



WWF for a living planet®

LAPORAN LOKAKARYA

KESEPAKATAN KERJASAMA MULTI STAKEHOLDER PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN MERAUKE

DONOR NZ - ID 017002-3515



Oleh :
Dendy Sofyandy

WWF Indonesia Region Sahul Papua Kantor Merauke

2006



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
PEMBUKAAN	
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke.....	1
WWF Indonesia Region Sahul Papua	2
Bupati Kabupaten Merauke.....	3
PROSES LOKAKARYA	
Bagian I. Pendahuluan	7
Bagian II. Presentase dari Kelompok Mo Make Unaf.....	13
Presentase dari Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke.....	13
Presentase dari WWF	14
Bagian III. Hasil Diskusi Kelompok	19
Pleno Hasil Diskusi Kelompok	21
PENUTUPAN	
WWF Indonesia Region Sahul Papua	24
Wakil Bupati Kabupaten Merauke.....	25
Lampiran	
Foto Kegiatan	27



PEMBUKAAN

Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke, Oleh : YP. Kamarka

Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merauke
Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Merauke atau yang mewakili
Yang terhormat Bapak Manager WWF kantor Merauke
Dan Bapak/Ibu/para undangan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kemurahan-NYA kita dapat mengikuti kegiatan lokakarya ini.

Pengelolaan hutan produksi lestari merupakan suatu kebijakan pemerintah, khususnya departemen kehutanan dan berbagai stakeholder, kaitannya untuk menjamin senantiasa keberlangsungan hutan untuk menghasilkan kayu bagi kepentingan masyarakat guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Kayu di Kabupaten Merauke dapat dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri atau lokal maupun keluar negeri.

Kaitannya dengan pelestarian hutan tersebut, maka atas inisiatif WWF Indonesia Kantor Merauke, telah membuka satu peluang untuk kita supaya tetap menjamin kelestarian hutan produksi ini. Untuk kedepan agar bisa lebih menjamin lagi keberadaan kayu itu untuk dijual keluar negeri maupun dalam negeri.

Dahulu kita mengenal adanya Kopermas di Papua ini, namun sekarang pemerintah sudah membatalkannya. Sekarang kita menempuh suatu kebijakan lain untuk masyarakat bisa mengelola hutan, agar kedepan bagaimana kita memberdayakan masyarakat disekitar hutan. Status hutan adalah hak ulayat masyarakat sehingga patutlah masyarakat diberikan peluang atau peranan lebih besar untuk mengelola hutan. Kaidah atau cara atau unsur kearifan lokal di masyarakat menjadi materi yang akan kita bahas agar kedepan pengelolaan hutan lestari bisa sejalan dengan apa yang kita rencanakan.

Undang-undang atau peraturan pemerintah juga melindungi kayu atau satwa yang kita punya, secara adat kita punya kearifan lokal untuk melindungi itu semua. Kami juga mohon masukan dari Bapak Bupati menyangkut pengelolaan hutan yang lestari berbasis kearifan lokal atau sasi di merauke.

Demikian sambutan kami, selamat siang.



Sambutan WWF Indonesia Region Sahul Papua, Oleh : T. Barano, S.S. Meteray

Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Merauke
Yang terhormat Bapak Kapolres atau Wakil
Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke
Dan para peserta lokakarya dari kelompok Mo Make Unaf dan semua instansi terkait yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, saya mengawalinya dengan bercerita tentang Angsa dan Telur Emas. Ada seorang petani yang memiliki angsa yang bertelur emas, setiap pagi hari sang petani mendapatkan sebutir telur emas yang bisa ia jual dan membuatnya senang dan kaya. Namun suatu ketika sang petani menunggu terlalu lama untuk mendapatkan telur emas maka ia langsung membelah angsa tersebut dan ternyata didalam perut angsa itu tidak terdapat sebutir telur emas pun, selanjutnya sang petani tidak pernah mendapatkan lagi telur emas.

Angsa yang saya maksudkan disini adalah hutan yang kita miliki dan telur emas itu adalah apapun yang dihasilkan hutan baik kayu maupun non kayu. Kaitannya dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat adalah bahwa adat yang telah menanamkan nilai-nilai yang selaras dengan kelestarian itulah yang membuat keberadaan hutan-hutan diwilayah Papua sampai saat ini. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat seperti hutan sebagai sumber makanan, sumber obat-obatan, sumber mata air atau hutan sebagai identitas budaya sehingga menyebabkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan hutannya.

Pada hari ini kita mencoba melihat bagaimana “si angsa” ini bisa menghasilkan begitu banyak “telur-telur emas” yang kita harapkan. Kelompok Mo Make Unaf sudah memiliki motivasi untuk memproduksi kayu dari hak ulayatnya. Prinsip yang sudah ada dalam masyarakat menjadi suatu pengontrol bagi masyarakat sendiri, seperti nilai-nilai sasi. Nilai ini sudah ada pada masyarakat sehingga kami sangat percaya bahwa masyarakat adat dapat mengelola hutannya dengan tidak merusak.

Sekarang saatnya kita berubah, dahulu ada istilah sewa dusun sekarang kita berharap bahwa masyarakatlah yang mau bekerja dan mau untuk menjaga hutan tersebut, baik kayu maupun hasil buruan dan lainnya. Kelompok Mo Make Unaf diharapkan bisa menjaga kawasan-kawasan essensial atau kawasan identitas budaya didalam areal hutan yang akan mereka kelola nanti. Ada aspek keseimbangan antara apa yang dihasilkan hutan dengan kemampuan dari hutan untuk terus memproduksi.

Demikian sambutan kami untuk selanjutnya kami sangat membutuhkan masukan dan arahan dari Bapak Bupati agar lokakarya kita ini bisa mencapai hasil optimal.



Sambutan Bupati Kabupaten Merauke, Oleh : JOHANNES GLUBA GEBZE

Yang kami kasihi WAKAPOLRES Merauke
Yang kami kasihi Kepala Dinas Kehutanan dan
Yang kami kasihi pengelola yayasan WWF dan seluruh jajarannya
Serta masyarakat dari seluruh kawasan adat di Merauke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkembangan pengelolaan alam sesungguhnya sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan seperti hukum Tuhan, hukum adat dan hukum formal pemerintah. Ada undang-undang No. 6 tahun 1967, UU tentang lingkungan hidup, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistimnya. UU ini belum selaras dengan tata cara adat yang ada diseluruh wilayah Indonesia karena belum mengakomodir pendekatan secara formal dan secara adat. Diatas kedua hukum tersebut masih ada hukum Tuhan.

Ada konsep pengelolaan hutan, rawa, kali, dusun didalam struktur orang Malind. Ada kelompok manusia yang dihimpun Tuhan di Kebunangga dan di Samile. Rumpun Gebze ada dibagi jadi Gebze Dinaulik, Gebze Ongolik, Gebze Walinaulik, Moyuend dan semua yang lainnya begitu juga dengan Samile. Masing-masing manusia lalu di kasih simbol. Ada 2 tanda yang dikasih sebagai pelengkap seperti simbol-simbol binatang baik kaki empat maupun kaki dua bahkan yang merayap pun dikasih simbol untuk kita. Untuk menghias diri ketika kita akan bermain gatsi juga dikasih simbol. Manusia meninggal pun juga dikasih hiasan simbol tertentu.

Orang-orang Malind dari dulu tidak pernah mengenal hiasan emas atau perak tapi seluruhnya menggunakan hiasan dari alam, hal ini yang membuat kita beda. Kalau kita menggunakan perhiasan alam berarti kita merupakan satu nyawa atau satu kesatuan yang integral atau terpadu antara manusia Malind dan alam Malind serta isi alam yang ada. Tidak ada satu makhluk dibumi Malind ini yang tidak dikasih pemilikan, semua benda mulai dari makhluk hidup sampai makhluk mati yang berkaki empat, kaki dua dan yang tidak berkaki semuanya sudah dibagi simbol-simbolnya sehingga kita dikasih kewajiban untuk pelihara binatang totemnya itu baik-baik. Cara mengambil sagu, membawa atau memasaknya, semuanya itu sudah ada aturan, cara membunuh babi dihutan juga ada aturannya.

Jika ada yang melanggar atau tidak menghargai simbol atau lingkungan maka hukumnya adalah mati atau dikembara karena tidak menghargai. Hukum adat Malind memiliki ancaman tertinggi bagi mereka yang tidak menghargai benda-benda totem adalah mati. Penghargaan terhadap alam sebenarnya sudah ada di orang-orang Malind melalui hukum adat yang sangat keras.

Kita masuk ke dusun orang lain untuk mengambil ikan, biar ada babi lewat didepan mata, kita tidak boleh panah karena berada pada satu kesatuan kepemilikan orang atau dusun orang lain, apalagi sudah diberi "sasi" untuk sementara ditutup karena ada keluarga yang meninggal dan diberi simbol berupa daun kelapa. Tarian Gatsi pun jika melewati daerah Sasi harus berhenti dulu, kita tidak diperbolehkan membunuh binatang bahkan bersuara, jangan kita menjadi "dom anim" atau manusia yang tidak tahu sopan santun.



Sasi sebenarnya adalah proses pemulihan terhadap alam, binatang-binatang atau seluruh makhluk hidup yang berada pada daerah tersebut agar menjadi jinak atau keberadaan makhluk hidup dapat tersedia sampai kapan saja.

Seluruh makhluk hidup sudah terbagi habis dalam kepemilikan orang Malind, sekarang data itu tidak ada. Kita mau orang lain mengikuti aturan kita tapi data-data seperti itu belum kita bukukan. Bagaimana orang Malind memelihara alam dengan tata cara adat? mungkin WWF bisa membantu hal ini.

Sekarang ini ketua LMA kita mengurus jual beli tanah, urus pasir, urus pegawai negeri sedangkan adatnya sendiri tidak diurus, mungkin diganti saja nama lembaga adat tersebut menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat Malind. LMA harusnya membukukan, mengidentifikasi hukum adat tentang pengelolaan lingkungan. Ukiran dan hiasan melambangkan keberadaan orang Malind. Gambir sudah ditebang habis kemudian kasuari akan menghilang dan kalian mau menghias diri dengan apa kalau kasuari sudah tidak ada, akhirnya sekarang orang menari sudah pakai ijuk itu berarti Malind palsu. Lestari alam berarti lestari adat dan berarti pula lestari identitas budaya.

Berikutnya adalah Konsep “Dema”. WWF nanti akan membantu mengidentifikasi seluruh daerah “Pamali”. Hal ini merupakan inti yang menjamin proses pelestarian. Konsep dema dilihat dari sisi agama bukanlah penyembahan berhala tetapi sebenarnya adalah konsep theologia Malind atau konsep Ketuhanan orang Malind. Konsep Dema sebenarnya penyembahan terhadap sebuah kekuatan, itulah mistik. Pamali juga menggunakan simbol sehingga bisa kita menyampaikan kepada orang lain untuk ikut melestarikan jika mengetahui suatu daerah sedang di sasi atau ada kawasan pamali. Proses estafet tentang adat bisa kita lakukan melalui kegiatan belajar mengajar disekolah. WWF dan LMA nanti akan membantu hal seperti ini, saya juga akan membantu dengan pikiran.

Konsep Dema berhubungan dengan pelestarian alam karena tidak boleh disentuh seperti contoh orang tidak berani buang air di kawasan tersebut, contoh di daerah Bambu Pamali yang sekarang tempat sakralnya sudah tidak ada dan satu yang masih ada di Buti, di kawasan Pamali meskipun ada orang yang sedang mabuk lewat tapi tidak berani macam-macam, orang naik motor pun menurunkan kecepatannya dan sekalipun ada orang yang sedang marah-marah tapi ketika melewati daerah tersebut dia akan berhenti bersuara hingga setelah melewati kawasan tersebut baru melampiaskan amarahnya. Tidak ada yang berani mencabut bambu dan tanaman lainnya, itulah sebenarnya inti penunjang konsep pelestarian ini, jadi sebenarnya orang Malind lebih tangguh dalam hal melestarikan lingkungan, tidak harus membuka-buka buku mempelajari bagaimana melestarikan alam. Kita hanya perlu kembali ke adat saja dan menaruh simbol-simbol lalu disosialisasikan, proses ini yang perlu kita lakukan.

Perlu saya beritahukan bahwa ada pendataan daerah Pamali di Malind, jadi jangan hanya mengurus Taman Nasional saja tapi juga daerah Pamali di Malind ini. Berbeda dengan daerah Pamali yang tidak berani diusik Taman Nasional yang katanya tidak boleh disentuh, dipasang papan larangan dan sebagainya tapi ketika Chainsaw masuk memabat maka habislah, maka konsep konservasi seharusnya berlandaskan pada mistik, dibuat acara-acara ritual, itulah kepatuhan terhadap tata cara adat dalam pengelolaan rahmat atas tanah ulayat jadi semakin ke depan WWF semakin berdasarkan daerah Pamali, kembalikan itu pada somasi adat



Waktu saya terlibat dengan proyek-proyek 14 tahun Taman Nasional di Indonesia, ada konservasi alam, pelestarian alam dan semacam itu, itu harap dijadikan Taman Adat, pendekatan Dema, pendekatan daerah Pamali, pendekatan sanksi maka tidak akan ada yang berani mengusik. Teori ilmiah tidak ada yang bisa menyelamatkan kawasan konservasi seperti pendekatan Pamali. Rencana biaya kita ke depan itu adalah biaya untuk daerah Pamali, setelah somasi baru kita memikirkan zona inti, kawasan penyangga, zona pemanfaatan dan pendekatan lainnya yang nanti diatur.

Ada yang meminta pembuatan jalan sampai ke Kondo tapi saya tidak terima karena itu daerah pusat kehidupan orang Malind, kita tidak akan membuka jalan ke Kondo hingga kita benahi. WWF akan membantu dengan peta somasi. Jangan katakan Dema itu mistik tetapi bahwa ada suatu kekuatan, Dema kepiting, Dema babi dan Dema lainnya, lalu buatlah simbol dan orang yang lewat akan membawa sesajian serta meminta ijin.

Konsep yang dibuat saya ubah, ini kearifan lokal yang diutamakan ke arah sana, jangan membicarakan teori orang lain karena kita juga punya teori untuk disosialisasikan kepada anak-anak, dibukukan dan dijadikan mata pelajaran di sekolah-sekolah dengan bantuan WWF.

Proses pemurnian adat ini akan lama, penyesuaian kembali adat Dema. Dengan konsep pengelolaan dengan basis kearifan lokal, narasumber bukanlah orang pintar tapi orang pintar jadi pendengar, maka akan kita balik orang Malind yang akan menjadi narasumber. Memberikan bahan yang akan diramu menjadi konsep pengelolaan alam itu berdasarkan ajaran kembali ke adat atau sebagai pemberi ilmu kepada WWF. Teori formal ditinggalkan dulu, gali dan pada saat dimana kita akan hubungkan dengan formal, jangan memberikan teori aneh tapi munculkan yang kita punya, hari ini dalam lokakarya kami memberi bahan. Beritahu baik-baik hiasan-hiasan yang kemarin, gambar anjing, babi, kasuari dan lain-lain menunjukkan ke arah sana tapi saat itu tidak didokumentasikan

Secara bertahap kita buka tabir, jadi tugas WWF mendengar dan menyusun langkah-langkah, saya akan pandu untuk mengembangkan konsep ini ke depan. Kalian ketua-ketua adat bisa menceritakan pada hari ini tentang semuanya, setelah itu bisa membuat program kerja, lalu ke depan kita membuat suatu gabungan konsep adat Malind dengan yang konsep formal, kita bicarakan aset hidup kita, falsafah hidup kita ke depan.

Saya kira demikian Bapak Ibu yang terkasih, para narasumber dari kampung-kampung di wilayah hukum adat Malind, semoga apa yang sudah saya ceritakan ini kesempatan kita untuk mengawali, kembali untuk memulai dari apa yang kita punya yang asli. Ini baru Anim-Ha dimulut belum terjadi dan untuk kembali kepada Anim-Ha sejati maka kembali pada apa yang kita punya dan kita lengkapi setelah kita memiliki dan tahu semua lalu kita minta dengan sosialisasi kepada saudara-saudara lain agar mereka tahu bagaimana tata cara orang Malind dengan tatanan adatnya.

Terima kasih pada WWF yang sudah memfasilitasi rencana ini, Bapak WaKapolres, Dinas Kehutanan, Kepala Bank Papua, Wartawan dan Wartawati dan teman-teman mitra usaha yang bergerak di dunia Kehutanan, Seluruh Hukum adat yang saya kasihi, semoga ini menjadi awal kita memulai kembali, orang Inggris mengatakan Back to Nature, Kembali ke adat. Semoga Allah Sang Pencerah akal budi akan memberikan pencerahan akal budi, akan lahir cerita yang menarik tentang potensi untuk mengelola dan melestarikan rahmat adat yang sudah dianugerahkan kepada kita sehingga



WWF for a living planet® “Laporan Lokakarya, 22 Maret 2006”

demikian akan ikut melestarikan alam anugerah Allah ini dan adat kita. Selamat berlokakarya, semoga Tuhan memberikan kesehatan dan menghasilkan buah lokakarya yang berguna untuk pelestarian. Terimakasih dan Selamat pagi

Dengan memohon perkenanan Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu pada leluhur pertama kali menerima adat ini, lokakarya dalam rangka mengintegrasikan atau membangun kekuatan adat sebagai pendukung pengelolaan alam saya nyatakan dibuka.



PROSES LOKAKARYA

Bagian I Pendahuluan

Sejak diterapkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua maka telah terjadi perubahan pola pengelolaan sumber daya alam khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu. Semangat otonomi membawa perubahan pengusahaan hutan dari pengelolaan berbasis pemerintah (*state based forest management*) berubah menjadi pengelolaan berbasis masyarakat adat (*community based forest management*).

Adanya peluang yang besar bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutannya tidak diikuti dengan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan teknis kehutanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang seharusnya memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya pada kenyataan tidak dapat berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik dan meningkatnya laju fragmentasi hutan produksi. Salah satu aspek utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya hutan adalah kapasitas masyarakat itu sendiri untuk dapat melakukan pengelolaan hutannya dengan berlandaskan pada asas-asas pengelolaan hutan yang berlaku.

Keahlian di bidang pengelolaan hutan yang lestari kurang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas penebangan pohon dari hutan ulayatnya, mereka membayar orang untuk melakukan penebangan sampai dengan pengerjaannya menjadi kayu olahan atau yang lebih dikenal dengan istilah sewa dusun melalui pembayaran jumlah kubikasi. Selain itu ketidakmampuan mereka untuk menilai dan memberi harga atas potensi yang terkandung dalam kawasan hutan ulayatnya serta tidak adanya anggota masyarakat lokal yang dilibatkan dalam proses pengelolaan areal kerja oleh pihak pengelola sehingga tidak ada kontrol masyarakat terhadap hutan ulayatnya.

Di lain pihak pengelolaan hutan produksi merupakan kegiatan yang kompleks, memerlukan modal yang cukup besar dan harus didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai dan juga telah memiliki jaringan terhadap pasar atau pembeli. Kekurangan kapasitas pengetahuan kehutanan dan fasilitas pendukung inilah yang menyebabkan masyarakat bermitra dengan pihak investor.

Masyarakat juga belum mengetahui dan memahami peraturan kebijakan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, sehingga tidak mungkin dapat menerapkannya. Berdasarkan kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas masyarakat adat untuk melakukan pengelolaan hutan secara mandiri masih rendah. Bertolak dari kondisi seperti inilah maka perlu ditingkatkan pengetahuan teknis masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat adat itu sendiri dan meningkat pula keamanan dan kualitas sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Secara adat, masyarakat tradisional memiliki pengetahuan pengelolaan hutan yang baik dan telah diatur sistim pengelolannya melalui kearifan lokal secara turun temurun. Di Merauke sistim kearifan lokal ini dikenal dengan sebutan "SASI". Hutan memiliki nilai



yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal karena nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Informasi ini masih sangat sedikit diketahui sehingga pengelolaan hutan belum maksimal menyangkut identitas hutan untuk melindungi budaya tradisional karena hutan juga akan berfungsi sebagai pemelihara integritas budaya masyarakat lokal, seperti hutan sakral dan hutan sebagai sumber mata pencaharian atau sumber penghidupan masyarakat. Manajemen kearifan lokal atau sasi yang baik akan berdampak pada kemajuan pengelolaan hutan yang lestari.

Perlindungan terhadap kawasan hutan yang dilakukan secara adat seperti hutan sebagai identitas budaya (hutan sakral), hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat (hutan sagu, hutan buruan, kali sebagai sumber penangkapan ikan) dan hutan yang memiliki hubungan nilai religius menyangkut flora dan faunanya. Jika masyarakat telah memiliki informasi lengkap dan telah melindungi kawasan hutan tersebut secara adat maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan menjadi sumber pendapatan ekonomi baru bagi masyarakat melalui semacam pengelolaan Hutan Adat atau Taman Adat.

Proses menuju pengelolaan hutan produksi lestari berbasis masyarakat adat ini masih membutuhkan beberapa tahapan usulan penyempurnaan seperti :

1. Kesepahaman antara Pemerintah Nasional dengan Pemerintah Daerah menyangkut aturan perundangan yang digunakan dan juga dalam menentukan model pengelolaan yang membuka akses masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan ulayat mereka.
2. Kesepahaman model pengelolaan oleh berbagai stakeholder menyangkut prasyarat kondisi yang dibutuhkan dalam model pengelolaan tersebut seperti kebijakan, kelembagaan, fungsi, tanggung jawab dan dukungan pembinaan serta pendanaan.
3. Kebijakan yang dapat menjamin akses peran serta masyarakat adat didalam pengelolaan hutan dapat menjadi pemikiran semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lebih baik.

Strategi pelaksanaan pengelolaan hutan alam produksi lestari oleh masyarakat adat dapat diawali dengan melakukan rencana-rencana aksi seperti :

1. Secara bertahap merubah pola pikir dalam memandang hutan yang dikelola masyarakat adat bahwa hutan tidak hanya menghasilkan produk kayu tapi juga hasil hutan bernilai ekonomis lainnya, seperti produk non-kayu (kulit pohon, tanaman obat-obatan, ukiran adat, dll) dan manfaat ekologis (air, udara bersih, dll).
2. Penguatan kapasitas masyarakat adat berkaitan dengan pengelolaan hutan, penguatan kelembagaan, meningkatkan posisi tawar petani, membangun jaringan dengan pihak lain dan melakukan transfer pengalaman kepada para pihak dan ke generasi berikutnya secara berkelanjutan.
3. Membangun jaringan (dalam bentuk komitmen dan kerja sama) yang lebih luas kepada pemerintah, swasta/pasar dan pihak lain yang berkepentingan.
4. Melakukan promosi yang lebih luas dengan cara penyebaran informasi melalui media, penambah luasan hutan yang dikelola secara lestari, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang mengelola hutan produksi lestari kepada semua pihak.
5. Mempersiapkan data base/pendokumentasian pengelolaan hutan oleh masyarakat adat baik dari produk kayu maupun non-kayu. Dokumen ini sangat penting sebagai bahan masukan menuju sertifikasi.



6. Monitoring terhadap areal konsesi masyarakat adat, memperluas jaringan termasuk pasar, melakukan pelatihan dan pendampingan intensif.

Tujuan Kegiatan lokakarya ini adalah :

1. Menyamakan persepsi stakeholder mengenai pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Merauke.
2. Membangun komitmen stakeholder dalam mengembangkan pilot project pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal masyarakat.
3. Kesepahaman mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.
4. Kesepakatan mengenai perijinan/aturan/payung hukum yang akan digunakan dalam pengelolaan hutan produksi lestari berbasis masyarakat.
5. Kesepakatan mengenai perijinan/aturan/payung hukum yang akan digunakan dalam Industri Pengolahan Kayu.

Hasil yang Diharapkan adalah :

1. Adanya kesepahaman stakeholder mengenai pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal di Kabupaten Merauke.
2. Terciptanya komitmen bersama dalam mengembangkan pilot project pengelolaan hutan lestari berbasis kearifan lokal.
3. Adanya skema jaringan dan komitmen kerja sama meliputi fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara stakeholder yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan lestari.
4. Adanya informasi yang jelas mengenai perijinan/aturan/payung hukum oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada saat ini.
5. Adanya informasi yang jelas mengenai perijinan/aturan/payung hukum oleh pemerintah dalam Industri Pengolahan Kayu pada saat ini.

Tempat dan waktu pelaksanaan:

Kegiatan Lokakarya ini akan dilaksanakan di Cafe Bella Fiesta, Jl. Yobar II. Pada hari Rabu, Tanggal 22 Maret 2006.



DAFTAR PESERTA

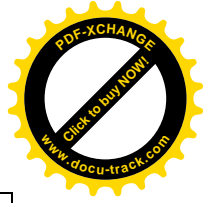
No	Instansi / Dinas/ Lembaga	Jumlah Peserta
Pemerintah		
1	DPRD Kabupaten Merauke	Tidak hadir
2	Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke	1. YP. Kamarka 2. Sumber Ishartono 3. Jopie Latuperissa 4. Irianto Yusuf
3	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke	Sumadi. S
4	Dinas Perindag Kabupaten Merauke	Saleh Hamid
5	Bapinda Kabupaten Merauke	Suyono
6	Distrik Kurik	Tidak hadir
7	Bank Papua	1. Windy 2. Matheus Krey
8	Kepolisian/Reskrim	Paul Agus. E
Masyarakat dan NGO		
1	PT. Agora Permai	Ekan Alhamid
2	LMA Malind Anim	Ignas Ndiken
3	Asosiasi Pengusaha Kayu Merauke	Jimmy Papare
4	Kelompok Masyarakat “Mo Make Unaf”	1. Simon Petrus Gebze 2. Theodorus Gebze 3. Ferry Gebze 4. Damianus Gebze 5. Dominikus Gebze 6. Thomas Ndiken 7. Alberthus Noriwari 8. Victor K. Mahuze 9. Roberthus Balagaize 10. Yohannis Kimun 11. Fidelis Basikbasik 12. Fransiskus Balagaize 13. Alfons Kanis Basikbasik 14. Agus b. Basikbasik 15. Heronimus Kaize 16. Alowysius Mahuze 17. Bonefasius Ndiken 18. Wilhemus Ndiken 19. Protasius Mahuze



		20. Leo Balagaize 21. Matheus Mahuze 22. Servator Mahuze 23. Effraim Pantris Mahuze 24. Lonnginus Mahuze 25. Yoseph Ndiken 26. Lukas Mahuze 27. Anselmus Balagaize 28. Paustinus Mahuze
5	WWF	1. Thomas Barano 2. Marthinus Wattimena 3. Dendy Sofyandy 4. Tri Waluyo
Total Peserta		45 orang

Jadwal (Tentatif) :

Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan	Keterangan
Rabu 22 Maret 2006	08.00-08.30	- Registrasi Peserta - Persiapan Pembukaan	OC
	08.30-09.30	Pembukaan Doa Sambutan-sambutan	MC Agustina Imbanop - Dinas Kehutanan - WWF - Bupati
	09.30-09.50	Istirahat/Snack	OC
	10.00-11.00	Program Kerja Kelompok (oleh Kelompok Masyarakat)	SC : Dendy Moderator : Marco W
	11.00-12.00	Peranan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat (oleh Dinas Kehutanan Kab. Merauke)	SC : KH Moderator : Thomas Barano
	12.00-13.00	Istirahat/Makan Siang	OC
	13.00-13.30	Perananan Perusahaan (oleh CV. Agora Indah)	SC : Ekan Alhamid Moderator : Marco W
	13.30-14.00	Perkembangan Kelompok Masyarakat (oleh WWF)	SC : Mo Make Unaf Moderator : Thomas Barano



	14.00-15.00	Diskusi Membahas : 1. Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, kontribusi dari Masing-Masing Pihak. 2. Mekanisme aliran dana/ BPD 3. Perijinan dan quota 4. Biaya kerja kelompok 5. Pengembangan Unit Managemen Masyarakat dan SDM	*SC : Dinas Kehutanan Dinas Koperasi UKM Dinas Perindag Bapinda Bank Papua WWF Moderator : Marco W
	15.00-15.20	Istirahat/Snack	OC
	15.20-17.00	Lanjutan Diskusi	IDEM*
	17.00	Penutupan	OC



Bagian II

PRESENTASE DARI KELOMPOK MO MAKE UNAF

Bapak-bapak dan Ibu yang kami cintai, kami dari kelompok Mo Make Unaf yang dalam bahasa Indonesia artinya "Mari kita maju", saya sebagai ketua kelompok nama saya Simon Petrus Gebze dan Wakil Ketua saya Albertus Noriwari.

Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah kita dengar dari bapak Bupati tentang tempat-tempat keramat sebelum kita menoleh pada pelestarian alam yang sudah ada sebelumnya kita melestarikan tempat-tempat keramat lebih dahulu, kami dari kelompok Mo Make Unaf. memiliki rencana yang sama dengan WWF dari beberapa bulan yang lalu kami bekerja di Dusun orang Kaliki, lalu WWF datang menjemput satu kelompok besar bernama Mo Make Unaf dengan anggota 20 orang.

Kami memiliki program kerja mengolah kayu, sementara ini kami masih kekurangan peralatan seperti Chainsaw, Sawmill dan lain-lain yang kami butuhkan untuk mengolah kayu, dengan adanya dukungan peralatan atau modal dari WWF untuk kita ke depan dengan daftar kelompok yang kita bina ini kiranya dapat memberikan kita petunjuk untuk bisa maju menjadi lebih baik dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat bersama-sama kita bergerak maju.

Kami memiliki program "Menebang lalu melakukan penanaman kembali" dengan petunjuk dari WWF untuk melestarikannya. itu saja yang saya sampaikan mengenai rencana kerja kami dan kendalanya adalah modal dan peralatan yang kami minta kepada Bapak-bapak terkait.

PRESENTASE DARI DINAS KEHUTANAN

Peranan Dinas Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan

Saya sekedar membacakan. Konsep tentang pengelolaan hutan lestari kami berbicara secara global adalah suatu konsep pengelolaan Sumber Daya Hutan atau Strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan yang menjamin keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan social.

Tujuan pertama yaitu produksi yang maksimal dari segi ekonomi dan kedua kelestarian hutan itu tetap yaitu prinsip ekologi, untuk mencapai tujuan usaha hutan wajib mengaplikasikan metode perusahaan, bisnis dan teknis kehutanan. Implementasi dan pembinaan hutan berhubungan dengan masalah perijinan dan pemasaran-pemasaran hasil hutan serta bagaimana kita melestarikan hutan itu sendiri sehingga keberlanjutan ekosistem tetap berjalan.

Pengelolaan hutan secara lestari ada beberapa prasyarat, yang pertama yaitu Pemetaan Partisipatif Hak Ulayat sampai ke tingkat madya serta penggunaan lahan menurut masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk pengakuan hak ulayat masyarakat atas wilayah adat dan ruang kelola seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Saat ini batas wilayah hanya ditandai oleh masyarakat tersebut tapi tidak diketahui orang lain jadi perlu dilakukan pemetaan ke suatu areal potensi yaitu hutan kayu layak dikelola dan



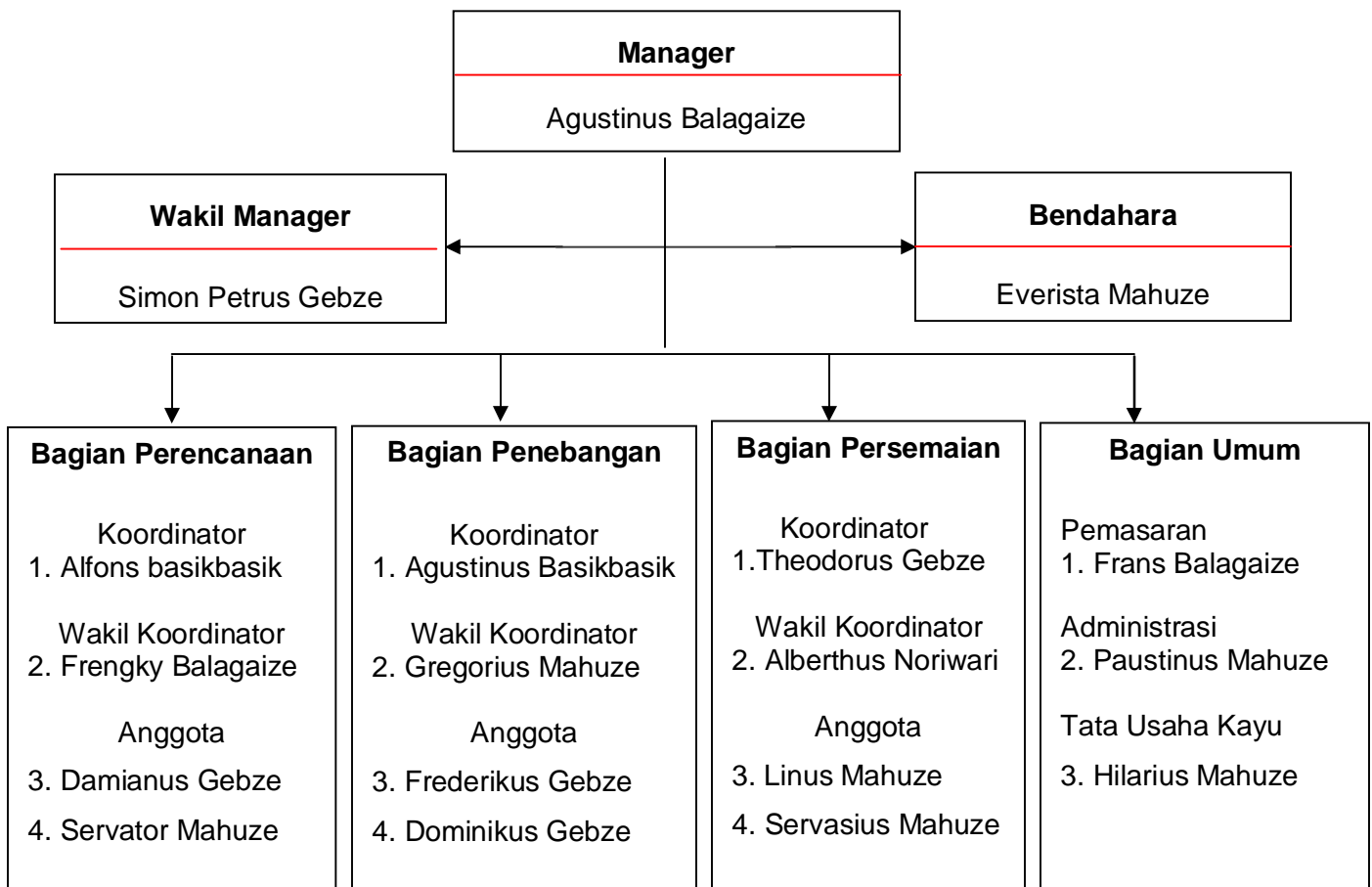
dipasarkan, artinya potensi diinventarisasi hutan wilayah, apa layak dikelola. Kita tidak tahu isi hutan itu apakah semua kayu layak produksi atau kayu yang tidak berpotensi.

PRESENTASE DARI WWF INDONESIA

Materi presentase menyajikan tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh WWF bersama dengan kelompok masyarakat, diantaranya :

1. Survey Awal Identifikasi Kelompok Masyarakat Pengelola Hasil Hutan di Kampung Baad, Wayau, Senegi dan Kaliki pada Tanggal 13 hingga 15 Oktober 2005.
2. Sosialisasi dan Workshop Community Small Scale Certification Sebagai Pilot Project Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Adat di Kabupaten Merauke pada Tanggal 24 dan 25 November 2005 di Balai Pertemuan Distrik Kurik.
3. Pelatihan Pembibitan dan Persemaian pada Tanggal 2 hingga 5 Pebruari 2006 di Kampung Baad Distrik Kurik.

Struktur Kepengurusan Kelompok





Pertanyaan : Dinas Kehutanan

Bisakah dijelaskan sedikit kelompok tersebut terdiri dari gabungan atau satu kampung saja?

Pertanyaan dan Tanggapan dari Kelompok Mo Make Unaf

Kami kelompok Mo Make Unaf terdiri dari beberapa kampung, seperti dari Baad, Kaliki dan Ivima-Had.

Terima kasih atas waktu yang diberikan, selaku ketua kelompok Mo Make Unaf perlu saya sampaikan kepada yang hadir pada pertemuan ini, masalah pembukuan sudah kami atasi didampingi dan dibantu Bapak Dendy dari WWF, yang kedua masalah sosialisasi kami telah diterima oleh kepolisian dan pemerintah daerah Kurik dan yang ketiga masalah penghijauan atau reboisasi, penanaman atau pembibitan yang telah kami lakukan, kegiatan ini sudah berjalan selama dua bulan, WWF telah membantu kami, kami sudah melakukan pembibitan pohon jenis Kedondong Hutan dan Kayu Dayung, ada dua jenis yang kami siapkan di Baad, itu saja yang perlu kami sampaikan, terimakasih.

Kami tambahkan sedikit saja mengenai dusun, kami masyarakat kampung Baad tapi menginap di dusun Kaliki dan mengolah di dusun orang Kaliki, kami minta ada perubahan dalam waktu dekat ini mungkin kami bisa mengambil hasil dari tempat lain yang termasuk wilayah Baad, itu saja dari kami, terimakasih.

Saya tambahkan sedikit mengenai orang Baad yang bekerja di dusun Kaliki, menurut Bapak Ndiken dari pada kita bekerja di dusun orang lain, lebih baik bekerja di dusun sendiri.

Tanggapan dari Dinas Kehutanan

Masalah ini ada hubungannya dengan lokasi kegiatan, kelompok terdiri dari beberapa kampung, kira-kira apakah sudah ada peta atau batas wilayah karena itu dibutuhkan dalam suatu pengelolaan, sehingga kita bisa mengatur suatu program, misalnya area nya 10 hektar dan dibutuhkan waktu berapa lama serta selanjutnya akan pindah ke mana? kedua yaitu mengenai potensi dari areal yg akan dikelola, kira-kira kayu bisa dikelola berapa lama? apakah layak dipasarkan. Saran saya yang merupakan indikator pelestarian hutan adalah fungsi sosial, bahwa dalam status areal harus ada kejelasan batas areal dengan pihak yang mengelola, apakah masyarakat Dusun Kaliki ini sudah bisa menerima.

Tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Kayu Merauke

Saran saya tentang reboisasi, mengapa program ini tidak dilaksanakan di Baad tapi di Kaliki? Yang kedua tentang dana reboisasi yang perlu dibicarakan dengan dinas-dinas terkait, pemberian dana melalui dinas terkait bukan melalui CV lagi. Kemudian yang kedua seperti yang dikatakan dari dinas kehutanan bahwa potensi perlu diperhatikan, coba Bapak-bapak kehutanan turun ke lapangan untuk melihat potensi. Lalu ketiga tentang bibit, mengapa kayu Bus dan Rahai tidak bapak tanam? kami melihat kayu bus punya potensi diimport ke luar negeri, kayu Bus di Riau dibuat pabrik kertas, di Jambi kayu Bus atau Rahai bibitnya diambil dari Merauke.



Tanggapan dari Dinas Kehutanan

Saya ingin bertanya pada kelompok bagaimana kesiapan sumber dayanya? Karena dalam pengelolaan kayu harus memiliki pengalaman, harus ada semacam pelatihan, misalnya dalam hal penebangan, kedua tentang orang Baad yang bekerja di Kaliki, saya kira bisa terjadi kesenjangan sosial antara orang Kaliki dengan orang luar, bagaimana kontribusinya dari segi finansial, sosial budaya, lembaga adat, ekonominya agar tidak terjadi kecemburuan.

Tanggapan dari WWF

Sedikit tambahan tentang status kelembagaan bahwa statusnya belum dilegalkan, contohnya apakah berbentuk CV atau PT, mungkin kelompok bisa berdiskusi untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu dilakukan, kedua tentang aspek keseimbangan antara proses produksi dan kemampuan produksi jadi ketika proses pemetaan sudah dilakukan apa yang perlu bapak-bapak lakukan, mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati kapan kita memakai Sasi dan pada saat seperti apa. Ketika hutan sudah tidak ada lagi yang bisa diambil kita tutup, kita beri simbol-simbol dan dokumentasikan sampaikan ke pihak-pihak luar, mereka mengerti bahwa dalam proses pengolahan yang berbasis kearifan tradisional itu ada cara-cara yang dipilih masyarakat dalam merotasi penebangan, ketika satu blok selesai dan pindah ke blok yang lain, seperti saran Pak Bupati kita memilih prinsip adat dalam mengolah dan disetujui oleh kelompok sebagai dasar, kita jangan sampai terlalu bersemangat untuk mengolah hutan tapi ternyata pada tahun ketiga atau keempat kita tidak bisa lagi memanfaatkan telur-telur emas

Tanggapan dari Kelompok Mo Make Unaf

Saya mau menjawab pertanyaan dari Dinas Kehutanan tentang batas wilayah kerja, untuk sementara ini kami belum membuat batas wilayah kerja, hanya saat kami mengolah di tempat orang Kaliki. Dusun milik Bapak Agustinus Balagaize sudah tidak ada masalah karena beliau yang meminta sendiri, lahannya ini berbatasan dengan punya orang Baad. Sedangkan mengenai peta belum kami buat, mengenai potensi hutan saat musim panas ataupun hujan lahan bisa kami olah, saat panas ikut darat saat hujan ikut kali, lalu mengapa kami mengolah lahan orang Kaliki karena kami bekerjasama dengan Bapak Agustinus Balagaize, maka apakah kami bisa mengolah di dusun Baad saja yang dekat dengan Kali Kumbe? Baru-baru kami mengerjakan hutan di sini saja hutan sudah agak gundul, kemudian penghijauan kembali harus dikerjakan oleh masyarakat sendiri lalu tentang pembibitan kenapa tidak menanam kayu Rahai tapi Kedondong Hutan dan Dayung karena ini swadaya, Rahai dan Bus tetap kami tanam tapi yang diutamakan adalah Kedondong hutan dan Dayung. Pertanyaan tentang pelatihan, kami semua dalam tahap belajar misalnya penggunaan Sawmill dan memang perlu pembinaan dari dinas terkait

Saya ingin menambahkan, tentang Badan hukum yang dalam keadaan macet, saya mohon kepada koperasi atau UKM untuk membentuk badan usaha dagang atau CV, kami dari Mo Make Unaf tidak terima sistem Kopermas dan kepada Dinas Perindag Kabupaten Merauke ini masalah dana bagi kami dan kami juga belum tahu dengan jalan apa kami bisa maju ke depan melestarikan hutan kami.



Pertama mungkin kita akan memberlakukan seperti yang sudah dijeaskan Pak Bupati, kita tidak perlu mengikuti cara-cara dari luar, mungkin kita akan memakai simbol-simbol, lalu yang kedua mungkin kita akan melihat dari sisi kelompok

Tanggapan dari Dinas Kehutanan

Kelompok yang terdiri dari beberapa kampung bagaimana caranya pengelolaan di masyarakat ini, sedangkan biasanya satu marga ini memiliki wilayah sendiri-sendiri? Misalnya kelompok A terdiri dari empat orang atau empat marga, berarti memiliki areal sendiri-sendiri, mengelola satu areal saja atau mengelola areal lain? Kelompok ini harus punya perencanaan, saran saya empat orang ini mengelola dusun sendiri agar kelompok ini jelas, meskipun Bapak-bapak telah memiliki kelompok tapi mengelola hutan harus punya ijin resmi, hasil yang dipasarkan bila tidak memiliki ijin tidak ada yang mau terima

Tanggapan dari Dinas Koperasi

Ada 25 unit Kopermas di Merauke tapi semuanya macet hanya ada 8 Kopermas yang agak aktif tetapi tidak ada kegiatan dan tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan. Kami mau menjelaskan Kopermas bukan dibentuk oleh Koperasi tapi hanya disahkan, yang membentuk adalah bapak-bapak sendiri. Jika mau membentuk CV atau PT silahkan, mungkin itu lebih baik. Koperasi bukan hanya mengurus Kopermas saja tapi membina semua usaha kecil yang membentuk kelompok. Kebanyakan dari kelompok usaha mengajukan modal usaha dan Dinas Koperasi tidak menyediakan dana karena sifatnya mengusulkan dalam APBD maupun APBN, itupun bila diterima. Masukan kepada kelompok-kelompok agar bisa mencari dana dalam hal ini Perbankan atau BUMN yang menyediakan dananya untuk usaha kecil dan menengah. Perlu diingat bahwa koperasi sangat terbatas hanya di aspek teknis kelembagaan, bila di aspek finansial hanyalah lintas sektoral maka belum maksimal. Umpamanya kurang modal bagaimana dari sisi Perbankan atau BUMN, bagaimana cara membentuk Koperasi agar bisa berjalan.

Tanggapan dari Dinas Perindag

Kami memang tidak memiliki sistem Open Dumping tapi kami lebih ke pengawasan, kami ingin tahu kegiatan apa saja yang telah Bapak-bapak laksanakan. Saya sedikit berbeda pendapat dengan Bapak dari Dinas Koperasi untuk kelompok atau orang banyak itu Koperasi lebih baik, sekarang tinggal bapak-bapak sendiri yang akan melaksanakannya, bila Bapak-bapak bekerja dengan hati nurani yang baik maka koperasi bisa berjalan dengan baik maka hak dan kewajiban sama-sama berjalan. CV itu biasanya untuk satu atau dua orang dan PT juga sudah terlalu mengikat dengan hukum yang ada

Tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Kayu Merauke

Saya mau tanya Bapak-bapak itu satu kelompok itu apa ada 10 orang? Masalah perijinan yang sudah disinggung sedikit oleh Dinas Kehutanan memang Presiden tidak mungkin memberikan satu areal untuk satu kelompok. Satu orang diberi hak sendiri-sendiri dalam hak ulayat. Kedua tentang membentuk CV itu terlalu rumit saya lebih suka bapak-bapak membentuk koperasi karena ada perhatian dari Pemerintah. Saya mau membahas Sawmill yang tidak bisa digunakan dan hanya bisa menjadi besi tua.



Gunakan Sawmill disuatu tempat lalu pindah dan Sawmill dibiarkan saja lalu membeli Sawmill baru. Perlu koordinasi antara koperasi dan bapak-bapak untuk mengatasi hal itu.

Tanggapan dari Kelompok Mo Make Unaf

Kami mau mengangkat masalah Sawmill dan dana. Masalah dana kami yang memiliki Dusun tidak bisa mengelola dan kami minta dari dinas-dinas terkait untuk memberi saran.

Kami mau menjawab masalah dari Dinas Kehutanan. Saat ini dalam kelompok ada 20 orang. Tidak dibagi kelompok-kelompok tapi hanya satu kelompok yaitu 20 orang itu. Ada operator Sawmill dan yang lainnya pekerja. Kami bekerja di satu dusun saja dimana dusun yang sudah siap untuk kami olah. Kami menebang lalu melakukan penghijauan setelah itu kami satu kelompok itu semua akan pindah bersama ke Dusun lain yang siap diolah. Kelompok tidak terpisah lalu mengenai kelompok mungkin ada saran dari Dinas Koperasi untuk kami bentuk kelompok itu dan berjalan dengan baik. lalu dari Bapak Jimmy mengenai sawmill, kami tidak tahu sawmill baru atau yang baik mutunya mohon dijelaskan agar kami tahu.

Moderator :

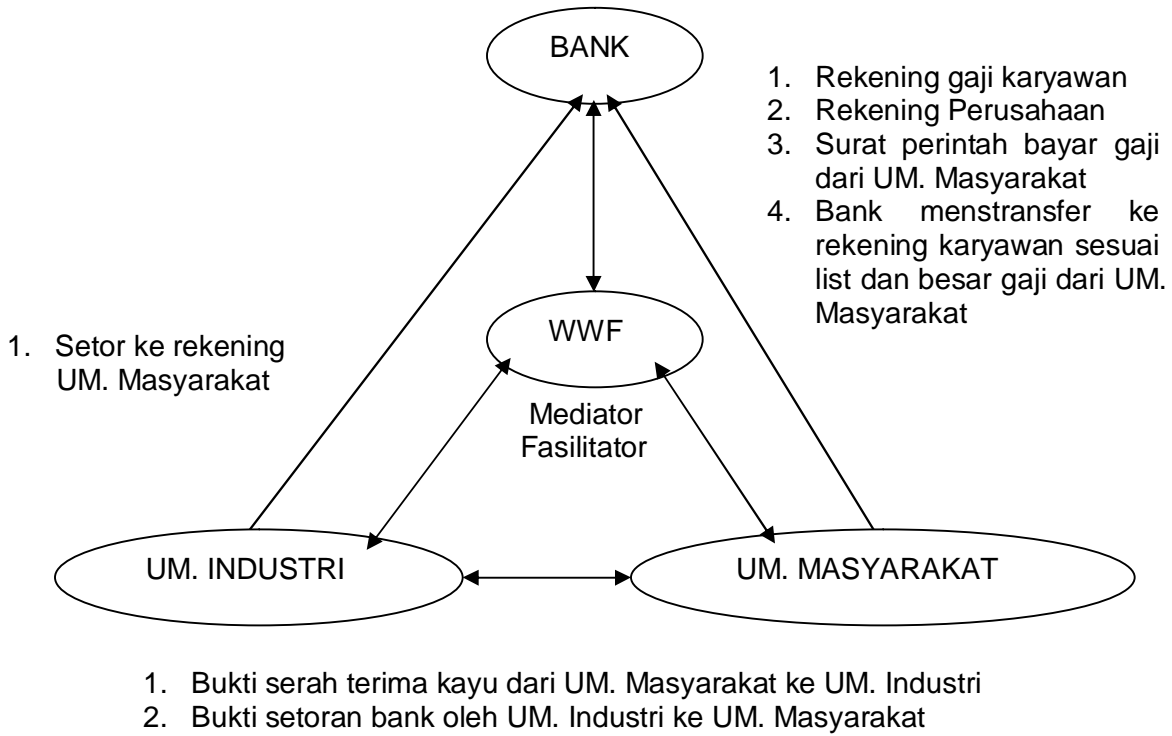
Poin-poin yang tadi sudah kita bicarakan dan kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan ke depan. Diskusi akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berhubungan dengan masalah perijinan, mekanisme bank dan wadah kelompok masyarakat kemudian kelompok kedua untuk internal dalam kelompok masyarakat seperti tantangan-tantangan atau sistem perlindungan yang disampaikan Pak Bupati. Hasilnya kita sampaikan dalam forum seperti ini lagi dan kami dari WWF akan bantu untuk membuat laporan hasil akan kami memperjuangkan ke Propinsi.



Bagian III

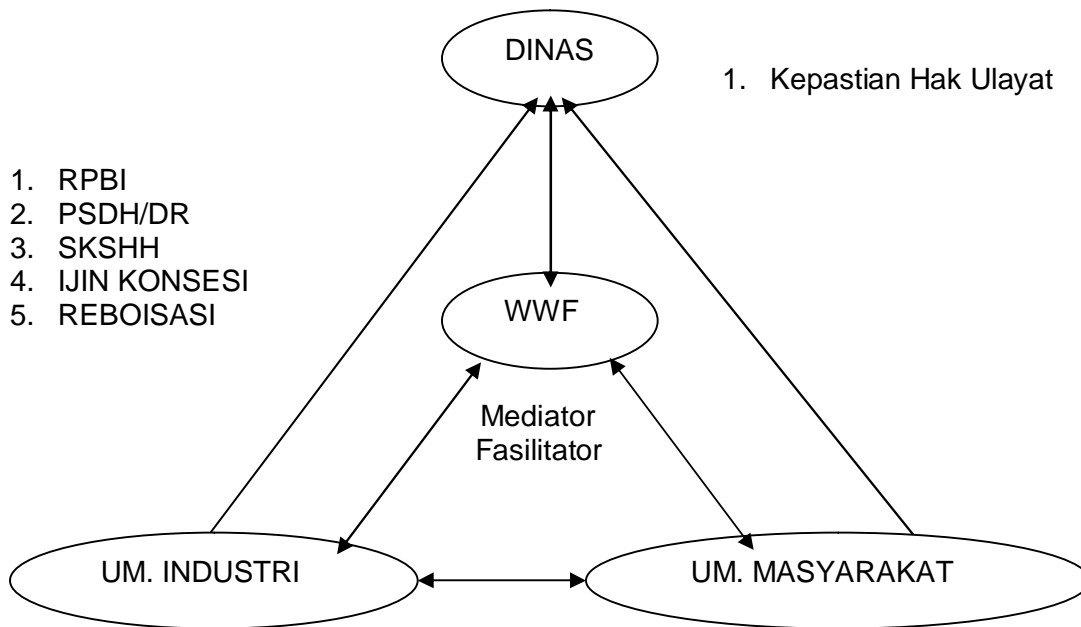
HASIL DISKUSI KELOMPOK

I. KESEPAKATAN SISTIM ALIRAN DANA ANTARA UNIT MANAGEMEN KELOMPOK MASYARAKAT, UNIT MANAGEMEN INDUSTRI DAN BANK PAPUA





II. KESEPAKATAN PENGURUSAN AREAL KONSESI DISERAHKAN KEPADA UNIT MANAGEMEN INDUSTRI



1. RPBI
2. PSDH/DR
3. SKSHH
4. IJIN KONSESI
5. REBOISASI

1. Supply hanya untuk UM. Industri
2. Harga jual akan diatur? Sesuai biaya yang telah dikeluarkan UM. Industri
3. Pembinaan kepada masyarakat oleh UM. Industri



III. Pengembangan Unit Manajemen Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Terima kasih atas waktunya, kelompok kami yang membahas mengenai pembiayaan, dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Manajemen baru dalam tahap menyepakati jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam kelompok. Masing-masing dengan tugas dan fungsinya dan kita akan melihat potensi didalam individu masing-masing yang bisa memperkuat unit-unit yang ada.

Kami membahas perencanaan untuk kegiatan-kegiatan awal persiapan sampai identifikasi potensi baik potensi kayu maupun batas-batas jelas kepemilikan hak ulayat. Proses penebangan hingga pembibitan dalam kerangka pelaksanaan individu memperkuat unit kelompok. Masing-masing melihat kapasitasnya yang berbeda sehingga akan dipetakan dulu. Mengenai evaluasi dan pemasaran rencana beberapa kelompok belum ada kata sepakat mengenai operasional pembiayaan karena waktu yang terbatas. Kami sama-sama menyepakati bahwa ke depan kita akan bersama-sama dengan instansi terkait dan WWF akan melihat lebih kebutuhan keorganisasian tersebut. Secara teknis bisa digambarkan dari penebangan itu apa saja yang dibutuhkan dan juga perencanaan apa saja yang dibutuhkan untuk survei. Apa saja yang harus diperhatikan dari sisi rotasi dan juga yang baru disebut Pak Bupati yaitu sistem adat atau sasi. Mengenai manajemen dan efluen dari apa yang kita perlukan kapasitas individu maka akan diperhatikan sejauh mana pelatihan yang harus diberikan, diharapkan keterlibatan dinas terkait dan WWF untuk membantu proses itu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.

PLENO HASIL DISKUSI KELOMPOK

Tanggapan dari WWF

Secara administrasi setelah beberapa poin yg harus kita penuhi mulai dari pemetaan hak ulayat Hasil pemetaan akan dicocokkan dengan peta yang dikeluarkan oleh departemen kehutanan. Kedua mengenai kelembagaan masyarakat, untuk saat ini masih disebut kelompok Mo Make Unaf kami belum berfikir menjadi bentuk lain karena dari segi Perbankan masih memungkinkan. Kegiatan-kegiatan yang lain misalnya bagaimana meningkatkan pengolahan kayu, dari hasil diskusi kami setuju bekerjasama dengan industri.

Saya bacakan poin-poinnya pertama secara administrasi perijinan akan dibantu oleh industri yaitu CV Agora dan untuk mekanisme transaksi pembayaran akan menggunakan jasa dari sistem perbankan. Sangat diharapkan semua anggota kelompok Mo Make Unaf memiliki KTP. KTP ini akan dibawa ke Perbankan dan akan dibuatkan rekening masing-masing anggota dan setiap anggota dimintai tanda tangan dan cap jempol.

Ketua kelompok mengkoordinir untuk mengumpulkan nanti akan ada 2 rekening. Untuk rekening Mo Make Unaf akan ditanda tangani oleh 3 petugas yaitu manager, bendahara, dan administrasi. Tujuan adanya rekening adalah untuk menerima setiap hasil usaha kelompok. Setiap akhir bulan akan disepakati tanggal berapa pembayaran akan diterima. Ketua atau manager, bendahara dan bagian administrasi akan membuat surat perintah bayar kepada Bank. Sementara untuk kesepakatan antara Mo Make Unaf, Kehutanan,



Industri dan WWF akan kita buat setelah pertemuan ini. Kita akan konsultasi melalui dinas Kehutanan siapa yang akan menandatangani, apakah Bupati atau bukan.

Tanggapan dari Bank Papua

Masalah cara pembagian gaji Kelompok, Industri dapat mengirimkan pada rekening yang dibuka atas nama Kelompok Mo Make Unaf lalu kelompok itu sendiri dapat mengatur pembagiannya masing-masing. Setiap anggota kelompok akan terjamin haknya tetapi setiap orang didalam kelompok harus punya nama jelas dan KTP serta tanda tangan harus tetap.

Tanggapan dari Dinas Kehutanan

Setiap orang yang ada dalam unit Perencanaan bisa melakukan seperti pada tabel dalam perencanaan, pemanenan, persemaian hingga penanaman. Orang tersebut bisa menjawab sendiri keahliannya dan kemampuannya. Coba dirumuskan kita sedang membicarakan Sumber Daya Manusia. Kita perlu membicarakan proses sosialisasi karena ini menyangkut dana yang kita punya jangan malu bertanya bila datang ke kehutanan jangan hanya membawa proposal dana tapi minta tolong diberikan cetakan tentang undang-undang agar anda bisa memahami.

Ketika kita memasuki suatu unit kita fokus ke situ jangan membicarakan tentang Chainsaw demikian juga ahli Chainsaw juga jangan membicarakan tentang perencanaan karena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Lokasi sudah ditentukan tinggal mengolah tidak perlu mencari lagi. Saat persemaian kita sebut Chainsaw maka kita menanam 15 minimal 5 tapi kita buat di atas 5 bibit semai karena tidak semua akan hidup. Menanam di hutan memang mudah hidup tapi kalau tidak ada aktifitas manusia yang melakukan penebangan secara besar-besaran. Daerah itu akan terbuka dan untuk kembali pada posisi semula akan sulit. Ada tips untuk mencegah kebakaran sebaiknya jangan menanam bibit yang pendek, tingginya kira-kira di atas lutut. Teknis penanaman biar bagian penanaman yang memikirkan dengan dibantu orang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Perlu perumusan dalam pelatihan agar bisa melakukan dengan benar di bagiannya masing-masing. Kita tidak bisa membuat satu kelompok saja harus di bagi bagian-bagian pekerjaannya sesuai keahlian. Bapak-bapak ini masih calon kelompok? Kita bisa meniru yang telah dilakukan oleh kelompok yang sudah di bentuk. Saya punya pertanyaan kira-kira siapa yang harus membiayai? mungkin diantara bapak-bapak ada satu orang yang memikirkan suatu program untuk dikembangkan, kita harus mengerti apa itu perencanaan, pembibitan, penyemaian, pemanenan, sampai evaluasi mungkin akan ada pertemuan yang bisa membahas secara teknis bagaimana organisasi ini bisa berjalan

Tanggapan dari WWF

Yang dimaksud dengan kerja kelompok ini adalah biaya operasional dari tiap kelompok, misalnya bagian perencanaan perlu melakukan pemetaan biaya, apa yang dibutuhkan, dibuat proposal pada tiap kegiatan. Bagian pemanenan yang butuh oli, bensin, makanan untuk beberapa hari, obat-obatan dan sebagainya. Bagian pembibitan yang membutuhkan polybag, pupuk dan sebagainya yang akan menangani bagian pemasaran. Ada investor yang bersedia menjadi Bapak angkat bagi Bapak-bapak, sebelumnya perlu ada pembicaraan antara Bapak-bapak dengan pihak investor.



Setiap organisasi selalu ada bagiannya masing-masing dan masalah dana lah yang perlu dipikirkan bersama-sama. Orang mau bekerja bila ada kepuasan ekonomi, bila ada kelompok besar mendapat upah maka dia akan membagi rata kepada tiap orang di kelompoknya. Suatu kelompok bekerja pada suatu dusun maka yang mendapatkan hasil lebih adalah orang-orang dusun selaku pemilik. Investor memfasilitasi Bapak-bapak, selaku Bapak angkat ini jangan dianggap Sinterclaus yang menolong tapi ia juga memiliki kepentingan dibelakangnya. Masalah pembiayaan ini perlu melihat segi ekonomisnya, semuanya itu bergantung pada cara bekerja Bapak-bapak sendiri. Misalnya dalam penggunaan bensin bagaimana bekerja efisien dalam penggunaannya agar bisa menghemat biaya, maka ini perlu ada pembicaraan antara kedua pihak terlibat.

Contohnya minyak kayu putih 30 ribu satu botol, harga kayu berapa rupiah, berapa ikat yang dibakar, perlu 125 kilo/daun ketel uap. Perlu biaya berapa untuk duduk makan pinang selama 3-4 jam. Berapa biaya dalam upaya mengambil minyak ke kota dijual dalam botol, label, tinta, maka harga 30 ribu adalah harga yang sudah dihitung. Bagian pemasaran yang akan bertugas menghitung, bila apa yang sudah direncanakan dikerjakan dengan baik maka proses produksi akan baik pula. Bisa dipercayai dan dibantu Bank dan Bapak angkat kita akan masuk dalam dunia bisnis dan lebih membicarakan keuntungan. Teman-teman perlu membuka diri dan kita merupakan organisasi yang memiliki bagian atas hak adat ulayat tidak mengatakan ini bagian saya dan itu bagianmu tapi kita akan bekerja ditempatmu dan mendapat bagian masing-masing. Ini yang saya maksud dengan sistem biaya. Bagian pemasaran berfikir sendiri bagaimana mendapat uang, maka tiap bagian harus saling membantu.

Kebutuhan pembibitan itu misalnya sekop, cangkul dan sebagainya itu yang perlu dicatat, berapa banyaknya. Bagian perencanaan butuh alat ukur, pensil, semua itu akan masuk dalam anggaran biaya operasional yang perlu dicatat. Masalah pembayaran upah ada bagiannya sendiri yang sudah dibagi berdasarkan fungsi tanggung jawab.

Bagian pemasaran pasti akan memikirkan pembiayaan lain, ada yang disimpan untuk kebutuhan lain. saya bukan orang ekonomi tapi tadi sudah kita dengar dari Perbankan sedikit mengenai sistem keuangan, meski masih awam kita akan mencoba mengerti.

Biaya operasional masing-masing akan dicatat dan menjadi bagian pertimbangan dan berusaha bertindak adil, biaya ini tidak selalu ada. Hasil dari diskusi akan kita catat poin-poinnya, masing-masing akan membuat biaya riil, kebutuhan untuk berapa tahun dan apa yang paling dibutuhkan saat ini



PENUTUP

Penyerahan Bantuan Peralatan Administrasi Kepada Kelompok Mo Make Unaf

Bersama ini kami menyerahkan secara simbolik sebagai awal keseriusan teman-teman dari Mo Make Unaf untuk mencoba berubah dari hanya secara lisan sampai bisa membuat surat-surat administratif.

Bantuan peralatan administrasi berupa :

No	Jenis	Jumlah
1	Mesin Ketik	1 buah
2	Pita Ketik	2 buah
3	Kertas Karbon	1 rim
4	Kertas HVS	2 rim
5	Hecter Clip (kecil & sedang)	2 buah
6	Isi Hecter (kecil & sedang)	2 pak
7	Amplop Surat	1 dos
8	Stempel Logo Kelompok Mo Make Unaf	1 buah

Sambutan WWF Indonesia Region Sahul Papua, Oleh : T. Barano, S.S. Meteray

Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Merauke dan Peserta Lokakarya sekalian.

Kami ucapkan puji dan syukur karena dalam satu hari ini kita bisa duduk bersama, belajar bersama dan berbagi tentang hal-hal yang sebelumnya kita belum tahu sehingga kita menjadi lebih tahu.

Kami keluarga besar WWF berterima kasih pada Pemerintah Kabupaten Merauke bagaimana inisiatif ini sangat didukung oleh bapak Bupati karena beliau melihat bahwa konservasi itu harus mulai dari masyarakat. Dalam pengertian konservasi ini orang berfikir bahwa WWF hanya bisa mengatakan "Jangan" lalu yang "Boleh" bagaimana? Saat ini merupakan bentuk lain dari pendekatan konservasi dimana proses yang kita lakukan itu adalah mulai dari masyarakat dan kami percaya bahwa masyarakat sudah memiliki nilai-nilai dan prinsip konservasi.

Yang belum dikembangkan adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki karena konservasi itu memiliki 3 aspek yaitu perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan yang kami inginkan seperti angsa yang menghasilkan telur-telur emas, perlu diingat terus telur angsa adalah hutan kita, jadi jangan sampai satu dua kali produksi kita cepat-cepat mengabiskannya.

Kasusnya akan seperti kulit buaya dan lain-lain dan kita akan menyesal telah kehilangan sumber daya alam kita. Yang dimaksudkan dengan pemanfaatan adalah setelah kita melakukan pemetaan hak ulayat lalu kita menilai potensi. Yang dimaksud potensi di sini



adalah ukuran kayu dan jenisnya. Kita bisa mulai memperhitungkan berapa banyak yang bisa diambil per waktu, per hari berapa kita mampu, per minggu berapa kita mampu sehingga usaha ini bisa terus-menerus dilakukan. Kalau bisa tidak hanya 2 sampai 5 tahun saja tapi bisa 10 hingga 30 tahun bahkan sampai turun temurun.

Kami juga berterima kasih kepada Pak Ignas, Ketua LMA Kabupaten, mungkin awalnya karena belum saling kenal atau sharing maka masih ada ketertutupan tapi setelah melakukan pembicaraan ternyata kita memiliki persamaan-persamaan. Kita akan berfikir bagaimana memulai dari masyarakat adat dan mencoba dengan apa yang sudah dimiliki.

Kami juga berterimakasih pada instansi terkait yang hadir dan memberi pencerahan. Terima kasih kepada Bank Papua yang memberi masukan.

Itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih untuk semangatnya dan segala kontribusi, pemikiran dan perhatiannya sehingga kita dapat melalui proses ini. Terima kasih.

Sambutan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Oleh : WARYOTO

Yang terhormat Direktur WWF

Yang terhormat Ketua LMA

Yang terhormat Wakil dari Bank Papua, Wakil dari Dinas Industri, Bapak-bapak tokoh masyarakat, pemuda, Para peserta dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita sebagai umat yang beragama pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena segala limpahan Rahmat-Nya lah kita pada sore hari ini dapat berkumpul.

kita semua datang ke sini untuk belajar karena dengan belajar kita semua mendapatkan pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik, saya yakin Bapak-bapak sudah lelah mengikuti kegiatan dari pagi hingga sore ini, tapi dengan lelah itulah Bapak-bapak bisa mengambil manfaat yang besar antara satu dan lainnya memberikan informasi.

Kita membicarakan Stakeholder maka kita semua dapat mengambil keputusan, itu bukan terbatas hanya untuk kita yang duduk di pemerintahan, kita warga masyarakat Bapak dan Ibu sekalian sebagai salah satu komponen di dalam Stakeholder itu sendiri. Bapak-bapak semua merupakan stakeholder dalam Lokakarya yang dilaksanakan oleh WWF ini. Apa yang sudah disampaikan Pak Bupati merupakan dasar dan pedoman untuk kita dan saya ingin tambahkan bahwa bila kita berbicara mengenai kearifan lokal maka tidak bisa terlepas dari adat kita. Bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalkan hutan kita dalam arti bukan hanya mengambil saja tapi bagaimana melestarikan hutan kita.

Tadi ada dua kelompok yang menyimpulkan sementara hasil dari lokakarya ini, saya pikir ini merupakan masukan bagi kita semua. Kita belajar bersama dalam hal administrasi karena akan dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian yang lain. Disamping kegiatan administrasi saya mohonkan kepada Bapak-bapak semua yang ikut dalam kegiatan ini, kita sudah membentuk kelompok dalam pembahasan ini kita bisa menginformasikan kepada warga yang lain agar warga atau masyarakat lain sedikit

mengetahui apa yang sudah kita bicarakan dan apa yang akan kita laksanakan ke depan. Demi peningkatan ekonomi kita dan kesejahteraan kita maka kita membentuk



kelompok itu. Ada Bank dimana proses bagaimana pengembaliannya juga perlu kita pahami, yang jelas saya menghimbau tolong disebarkan kepada masyarakat yang lain, terutama pada tokoh-tokoh adat kita yang ada di masing-masing kampung karena saya yakin dan percaya yang datang ini bukan hanya dari satu kampung tapi dari berbagai kampung.

Yang menarik bagi saya adalah pemetaan hak ulayat, saya sangat mendukung dan pasti Pak Bupati juga sangat mendukung karena pada waktu Beliau pertama kali menjabat sebagai Bupati pada masa lalu sebetulnya Beliau sudah membicarakan tentang Pemetaan Hak Ulayat itu. WWF sendiri sudah mensponsori dan apalagi dari Bapak-bapak sendiri yang terlibat dalam pemetaan Hak Ulayat ini akan sangat akurat karena Bapak-bapak yang mengetahui kondisi lapangan yang ada di wilayah kita.

Saya sarankan didalam tokoh atau marga yang satu dengan yang lain saling berkoordinasi agar dalam pemetaan Hak Ulayat ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita punya, misalnya satu marga memiliki hak sampai di daerah tertentu, marga B sampai daerah tertentu dan demikian juga marga C. Antara marga ada keterkaitan maka hasilnya adalah peta Kabupaten Merauke yang terdiri atas pembagian hak ulayat. Kita akan laporkan pada Pak Bupati dan mudah-mudahan ini akan menjadi perencanaan dalam pemerintah. Kami akan mendukung program dasar Bapak-bapak sekalian bila kita membicarakan Hak Ulayat memang kita tidak bisa bicara dalam satu atau dua bulan, kita pasti akan memakan waktu. Bila harus selesai 2 tahun tidak menjadi masalah yang penting kita telah memiliki peta hak ulayat yang juga bermanfaat untuk pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan untuk masa depan.

Katakanlah bila kita membutuhkan lahan kita bisa langsung menghubungi orang-orang yang terkait. Dalam berkoordinasi antara marga kita perlu adanya rasa kekeluargaan, jangan karena Hak Ulayat terjadi pertentangan sehingga hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dalam pelaksanaan pembangunan kita harus memikirkan anak cucu kita. Mudah-mudahan instansi terkait terutama dari Dinas Kehutanan mensupport apa yang sudah direncanakan pada sore ini dan ditindak lanjuti agar bisa berjalan berkesinambungan dan beriringan.

Untuk pelestarian perlu kita kembangkan, seperti yang dikatakan kulit gambir, kulit buaya semakin lama semakin menipis apalagi makanan pokok kita makin lama makin jauh, maka saya menghimbau disamping kita membicarakan potensi kayu dan lainnya kita juga membicarakan mengenai menanam kembali sagu kita. Bila ke hutan dan mengambil sagu, kita lalu menanam kembali di lahan yang sesuai kondisinya. Bapak-bapak di kampung-kampung marilah kita melestarikan makanan kita, meski beras juga ada tapi tidak ada salahnya kita menanam sagu kembali karena merupakan makanan pokok kita. Saya yakin bila kita bekerja dengan tulus dan dengan kemauan yang keras kita pasti akan ada hasilnya.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi sandaran atau wawasan untuk menambah pengetahuan kita semua. Apa yang sudah kita programkan bisa berjalan dengan baik.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maka kegiatan lokakarya pada hari ini, Rabu tanggal 22 Maret tahun 2006 secara resmi saya nyatakan ditutup, sekian dan terima kasih, selamat sore.



Photo-Photo Kegiatan Lokakarya

<p>Bupati Kabupaten Merauke sedang Memberikan Sambutan</p>	<p>Bupati Kabupaten Merauke Membuka dengan Resmi Kegiatan Lokakarya</p>
<p>Peserta dari Dinas Terkait</p>	<p>Peserta dari Kelompok Masyarakat</p>
<p>Proses Diskusi Kelompok</p>	<p>Wakil Bupati Menutup Resmi Kegiatan Lokakarya</p>